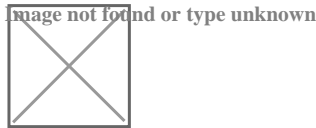


## Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Melalui Penggunaan Layanan Keuangan Formal



Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari kepemilikan akun yang meningkat secara signifikan pada 2020 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kepemilikan akun meningkat sebesar 6%, dari 55,7% di 2018 menjadi 61,7% di 2020. Sementara, penggunaan akun meningkat dari 76,19% menjadi 81,4%.

Dalam upaya mendorong peningkatan kepemilikan dan penggunaan layanan keuangan formal, serta pemanfaatan transaksi nontunai, pengembangan intervensi yang dapat direplikasi dilakukan melalui proyek percontohan percepatan keuangan, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Bank Dunia dan didukung oleh Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) telah melaksanakan Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif selama November 2019 sampai September 2020.

Proyek percontohan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, yang menysasar rumah tangga nelayan, dan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon, yang menysasar rumah tangga pekerja migran dan pekerja migran purna. Pelaksanaan proyek percontohan ini bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra industri jasa keuangan.

Beberapa mitra industri jasa keuangan yang turut berperan serta dalam proyek ini meliputi LJK perbankan maupun nonbank, yaitu BPD Jawa Barat dan Banten (BJB), BPD Kaltimtara, BPR Astanajapura, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, PNM Mekaar, Pegadaian, BPJS Kesehatan, Jasindo, dan BRILife serta penerbit uang elektronik LinkAja dan Dana. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, *product matching*, dan penciptaan ekosistem digital di desa.

“Replikasi yang lebih luas dari Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif sebagaimana yang dilakukan oleh Sekretariat DNKI bersama Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendukung tercapainya target keuangan inklusi sebesar 90% pada 2024,” tutur Asisten Deputy Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, mewakili Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang juga berperan sebagai Sekretaris DNKI, dalam acara “Diseminasi Hasil Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif” secara virtual, di Jakarta, Rabu (14/7).

Erdiriyo berharap dengan adanya diseminasi hasil proyek percontohan ini akan dapat membuka peluang kegiatan replikasi di daerah lain. “Kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan upaya-upaya mendorong inklusi keuangan menjadi penting, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai model intervensi percontohan seperti ini,” tutupnya.

Turut hadir dalam Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmis Triswati, Kepala KR2 OJK Indarto Budowitono, perwakilan dari Bank Dunia I Gede Putra Arsana, serta perwakilan dari Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur. (dep1/rep/fsr/hls)

\*\*\*